

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Program pemerintah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara Nasional di setiap satuan pendidikan, diarahkan pada upaya terselenggaranya layanan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan atau masyarakat. Upaya yang terus menerus dilakukan dan berkesinambungan diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan bermutu dan berkualitas, yang dapat menjamin bahwa proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah sudah sesuai harapan dan seharusnya terjadi. Pendidikan merupakan sebuah proses dan sekaligus sistem yang bermuara dan berujung pada pencapaian suatu kualitas manusia tertentu yang dianggap dan diyakini sebagai yang ideal. Berarti pendidikan jelas mempunyai tujuan, adapun tujuan pendidikan nasional menurut UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 4 adalah:

“Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, estetis, dan demokratis serta memiliki rasa kemasyarakatan dan kebangsaan.”

Guna mewujudkan itu semua perlu diusahakan terselenggaranya satu sistem pendidikan nasional yang bermutu dan mengingatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa. Usaha untuk terus meningkatkan mutu pendidikan tidak pernah berhenti dilaksanakan dan berbagai terobosan baru terus diperkenalkan dan dilakukan oleh pemerintah melalui Anonim, antara lain dalam bidang pengelolaan sekolah, peningkatan sumberdaya tenaga kependidikan, pengembangan materi ajar, dan lain sebagainya.

Kompetensi lulusan pada semua jenjang pendidikan merupakan topik yang tidak akan pernah habis untuk dibahas. Berbagai upaya untuk meningkatkan mutu lulusan terutama pada jenjang pendidikan dasar telah dilakukan, namun lulusan pendidikan dasar masih jauh harapan semua pihak. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu lulusan pendidikan dasar, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan keputusan Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah. keputusan tersebut kemudian diperkuat dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian dijabarkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Keputusan Mendiknas diatas dengan menunjuk seluruh sekolah agar diakreditasi, baik sekolah negeri atau swasta.

Sementara itu terobosan yang dilakukan dalam upaya peningkatan sumber daya tenaga kependidikan adalah melalui pelatihan terintegrasi bagi guru, kepala sekolah, dan staf dinas yang didasarkan kepada kompetensi yang harus mereka miliki. Untuk keperluan pelatihan terintegrasi tersebut salah satu materi dasar tentang akreditasi. Hal ini dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mencapai pendidikan

yang bermutu dengan cara memberikan penilaian terhadap sekolah. Agar mutu pendidikan sesuai dengan yang seharusnya dan yang diharapkan masyarakat, mungkin perlu kita pertanyakan standar seperti apa yang dapat dijadikan acuan?. Jika standar yang dikehendaki bersifat nasional, maka hendaknya standar tersebut juga harus bersifat nasional pula, baik dari aspek input hingga proses outputnya. Akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang memberikan pengakuan pada kelayakan suatu perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta, dalam memberikan pelayanan pendidikan. Sedangkan untuk tingkat sekolah, akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS).

Akreditasi sekolah mempunyai pengertian sebagai proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja lembaga atau suatu program pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik, alat regulasi diri (*self regulation*) dimana sekolah mengenal kekuatan dan kelemahannya. Hal ini memberikan makna dalam hasil sebagai suatu pengakuan, suatu sekolah telah memenuhi standar kelayakan yang ditentukan. Proses akreditasi harus dilaksanakan secara berkala dan terbuka dengan tujuan membantu dan memperdayakan lembaga pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanyadalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Proses akreditasi dimulai dengan; pertama, pelaksanaan evaluasi diri oleh sekolah, yaitu dengan cara sekolah mengisi instrument evaluasi diri yang diperoleh dari Badan Akreditasi Sekolah; kedua, pengajuan akreditasi oleh sekolah; ketiga, penentuan kelayakan

visitasi oleh Badan Akreditasi Sekolah; dan keempat, penerbitan hasil akreditasi oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) (Anonim,2004:43).

Beberapa hal yang perlu kita pertanyakan adalah benarkah ukuran akreditasi itu sudah standar? Benarkah sekolah yang terakreditasi itu sudah memenuhi standar minimal dari ketentuan akreditasi sekolah? Bagaimanakah suatu prosedur pengakreditasian suatu sekolah dilakukan? Sudahkah memenuhi aturan yang seharusnya dilakukan dalam proses pengakreditasian?

Akreditasi sekolah harus diletakkan dalam konteks peningkatan mutu pendidikan dan otonomi sekolah. Oleh karena itu di dalam proses peningkatan mutu pendidikan perlu dicari alternatif pengelolaan sekolah. Hal ini mendorong lahirnya konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Manajemen ini memberikan kemandirian kepada sekolah untuk mengatur dirinya sendiri dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Tetapi dalam pencapaian tujuan peningkatan mutu tersebut tetap mengacu pada kebijakan nasional, dan konsekuensi pelaksanaan program ini adalah ada komitmen yang tinggi dari berbagai pihak yaitu orang tua atau masyarakat, guru, kepala sekolah, siswa, staf lain, serta pemerintah.

Standarisasi pendidikan mempunyai makna sebagai upaya penyamaan antara pendidikan secara nasional yang memiliki keluasaan dan keluwesan dalam mengimplementasikannya. Evaluasi merupakan suatu proses kontinu dalam memperoleh data maupun informasi guna mengambil suatu keputusan. Agar mutu pendidikan sesuai dengan apa

yang seharusnya diharapkan oleh masyarakat, maka perlu ada standar yang dijadikan paku (*benchmark*). Dengan menggunakan instrument akreditasi yang komprehensif dan dikembangkan berdasarkan standar mutu yang ditetapkan diharapkan profil mutu sekolah dapat dipetakan untuk kepentingan peningkatan mutu sekolah oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Berkaitan dengan standar pendidikan, akreditasi sekolah menjadi salah satu bagian yang penting dalam upaya memperoleh informasi tentang kondisi nyata suatu sekolah berdasarkan standar minimal yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu dilaksanakan pengembangan sekolah secara adil dan merata baik untuk sekolah negeri maupun swasta (Anonim, 2005).

Ada dua fokus dalam penilaian kualitas sekolah dalam proses akreditasi sekolah, yaitu pertama, kelayakan dapat dilihat dari berbagai sumberdaya, sarana dan prasarana yang dimiliki, dan kedua, kinerja dapat dilihat dari proses dan hasil pendidikan yang dicapai sekolah yang bersangkutan. Dengan adanya komitmen yang tinggi dari berbagai pihak yaitu orang tua atau masyarakat, guru, kepala sekolah, siswa dan staf lainnya, serta pemerintah dalam pencapaian tujuan peningkatan mutu. Dalam pelaksanaannya strategi yang dapat dilaksanakan oleh sekolah antara lain meliputi evaluasi diri (*self evaluation*) untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan sekolah. Pada evaluasi tersebut sekolah bersama -

sama orangtua dan masyarakat menentukan visi dan misi sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan atau merumuskan mutu yang diharapkan dan dilanjutkan dengan menyusun rencana program sekolah termasuk pembiayaan dengan mengacu kepada skala prioritas dan kebijakan nasional sesuai dengan kondisi sekolah dan sumber daya yang tersedia.

Proses evaluasi terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas (*Quality Assurance*) dan pemberdayaan mereka yang dievaluasi sehingga menghasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Artinya pihak yang dievaluasi, apakah itu administrator pendidikan, kepala sekolah, guru, atau siswa akan merasakan bahwa kegiatan evaluasi membantu untuk mengenal berbagai kelebihan dan kekurangannya, serta memberikan arah yang jelas dilakukan untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu evaluasi harus dilaksanakan secara berkesinambungan, komprehensif, dan transparan serta memotivasi peserta didik dan pengelolaan pendidikan untuk terus menerus untuk berupaya meningkatkan mutu kegiatan pembelajaran dan pendidikan.

Proses akreditasi harus dilaksanakan secara berkala dan terbuka dengan tujuan membantu dan memperdayakan lembaga pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Proses akreditasi dilakukan dengan pertama, pelaksanaan evaluasi diri oleh sekolah yaitu dengan cara sekolah mengisi

instrument evaluasi diri yang diperoleh dari BAS; kedua, mengajukan akreditasi oleh sekolah; ketiga, penentuan kelayakan visitasi oleh BAS; keempat, pelaksanaan visitasi oleh Tim Asessor; kelima, penetapan hasil akreditasi; keenam, penerbitan hasil akreditasi oleh BAS (Anonim,2004:43).

Akreditasi sekolah harus diletakkan dalam konteks peningkatan mutu pendidikan dan otonomi sekolah. Oleh karena itu didalam proses peningkatan mutu pendidikan perlu dicari alternative pengelolaan sekolah. Hal ini mendorong lahirnya konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Manajemen alternative ini memberikan kemandirian kepada sekolah untuk mengatur dirinya sendiri dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, tetapi tetap mengacu pada kebijakan nasional. Konsekuensi dari pelaksanaan program ini adanya komitmen yang tinggi dari berbagai pihak yaitu orang tua atau masyarakat, guru kepala sekolah, siswa, dan staf lainnya, serta pemerintah sebagai partner dalam mencapai tujuan peningkatan mutu.

Akuntabilitas penyelenggara lembaga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dapat diketahui dari peringkat akreditasi yang dimiliki sekolah, hal ini sesuai dengan ayat 2 pasal 60 UU Sisdiknas Nomer 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Peringkat akreditasi tersebut adalah akreditasi harus benar-benar menggambarkan kualitas

sekolah sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang jelas tentang kualitas sekolah. Mengingat pentingnya akreditasi baik bagi sekolah maupun masyarakat, perlu dilakukan studi tentang pengembangan model penyelenggaraan akreditasi pada pendidikan dasar.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut, maka penulis akan mencoba mengambil judul “Akreditasi Sekolah Dan Mutu Pendidikan Studi Situs di SD Negeri Bulakrejo 02 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana karakteristik akreditasi sekolah dalam rangka mutu pendidikan di SD Negeri Bulakrejo 02, dan dirinci menjadi dua sub fokus.

1. Bagaimana ciri-ciri persiapan sekolah untuk di akreditasi dalam rangka mutu pendidikan di SD Negeri Bulakrejo 02, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.
2. Bagaimana ciri-ciri interaksi asesor dengan pengelola persekolahan di SD Negeri Bulakrejo 02, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.

C. Tujuan Penelitian

Setiap peneliti mempunyai tujuan atau sasaran yang akan dijadikan sebagai pedoman agar penelitian tersebut dapat sesuai dengan apa yang kita rencanakan, yakni berupa tujuan penelitian. Ada dua tujuan dalam penelitian ini.

1. Mendeskripsikan bagaimana ciri-ciri persiapan sekolah untuk diakreditasi dalam rangka mutu pendidikan yang dilaksanakan di SD Negeri Bulakrejo 02, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.
2. Mendeskripsikan bagaimana ciri-ciri interaksi asesor dengan pengelola sekolah di SD Negeri Bulakrejo 02, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

Setiap kegiatan penelitian diharapkan menghasilkan suatu manfaat. Manfaat penelitian adalah hasil dari penelitian yang dapat digunakan oleh berbagai pihak, manfaat dalam penelitian ini dibedakan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktisi.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan kajian, khususnya pada SD Negeri Bulakrejo 02 Kecamatan Sukoharjo dan pada umumnya semua Sekolah Dasar.

- b. Memberikan sumbangan wawasan bagi peneliti selanjutnya pada program pascasarjana magister manajemen pendidikan UMS.
- c. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam menerapkan teori dan mendapatkan gambaran dan pengalaman praktis dalam penelitian survey mengenai pelaksanaan akreditasi sekolah dan dampaknya terhadap mutu pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bahan masukan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam menganalisa dampak akreditasi dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Bulakrejo 02 dan Sekolah Dasar pada umumnya.
- c. Bagi masyarakat luas tentang hasil akreditasi, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan sekolah yang menjadi pilihan keluarga.

E. Daftar Istilah

1. Akreditasi merupakan suatu konsep regulasi diri (self-regulation) tanpa intervensi yang mengarah kepada penyelidikan atau pengenalan diri dan evaluasi, serta peningkatan yang berkelanjutan dari kualitas pendidikan.

2. Akreditasi Sekolah merupakan suatu kegiatan penilaian kelayakan dan kinerja suatu sekolah berdasarkan criteria (standar) yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS) yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 087/7/2002 .
3. Mutu pendidikan yang baik dibuat untuk menciptakan lingkungan yang baik pula bagi pendidik, orang tua, pejabat pemerintah, wakil – wakil masyarakat dan pemuka bisnis untuk bekerja bersama guna memberikan kepada para siswa sumber – sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi tantangan masyarakat, bisnis, dan akademik sekarang dan masa depan. Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang di hasilkan.